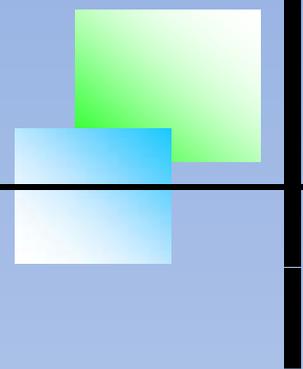


01/R-IDI/5300/2013

RINGKASAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) PROVINSI NTT TAHUN 2009 - 2010



<http://ntt.bps.go.id>



Kata Pengantar

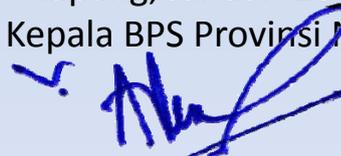
Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah dimulai sejak tahun 2007. BPS mulai terlibat langsung sejak penyusunan IDI 2009.

Pengumpulan data IDI berbeda dengan kegiatan survei BPS lainnya. Survei-survei yang dilakukan BPS pada umumnya bersifat kuantitatif dengan pendekatan rumah tangga atau perusahaan. Pada pengumpulan data IDI dilakukan gabungan survei kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui review surat kabar dan review dokumen. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

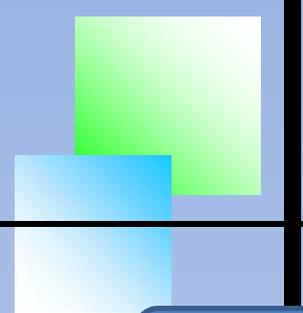
Sampai saat ini IDI merupakan satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui tingkat kemajuan demokrasi di tingkat provinsi. Terkait dengan hal tersebut, keberadaan IDI menjadi sangat penting bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah provinsi, partai politik, politisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kondisi demokrasi wilayah masing-masing. Kritik dan saran untuk penyempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang, sangat diharapkan.

Kupang, Januari 2013
Kepala BPS Provinsi NTT,



Ir. Aden Gultom, MM
NIP. 19590605 198103 1 005



Apakah IDI itu?



- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
- IDI telah disusun sejak tahun 2007. IDI 2007 merupakan embrio IDI berikutnya. Namun, indikator dan metode penghitungan yang digunakan dalam IDI 2007 berbeda dengan IDI sesudahnya sehingga secara teknis tidak dapat dibandingkan.
- Komponen IDI terdiri dari **3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator**

Aspek, Variabel, dan Indikator IDI 2009 - 2014

(3 aspek; 11 variabel; and 28 indikator)

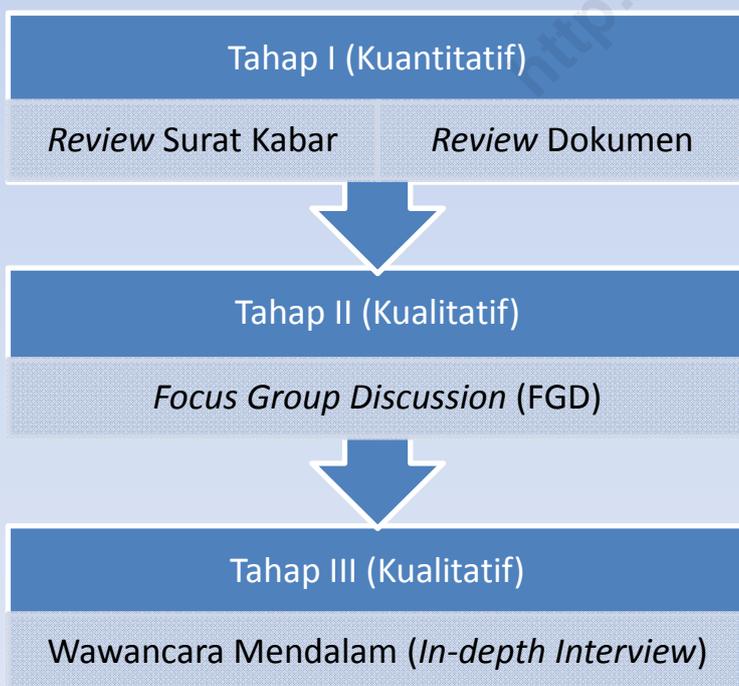
Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
Hak-Hak Politik	Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	Hak Partisipasi Politik: Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
Institusi Demokratis	Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	Peran DPRD	3 indikator
	Peran Partai Politik	2 indikator
	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	Peradilan yang Independen	2 indikator

Metodologi Puldata IDI



Metode pengumpulan data dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu :

- ❑ Pendekatan kuantitatif
Pendekatan kuantitatif dikumpulkan melalui *review* surat kabar dan *review* dokumen.
- ❑ Pendekatan kualitatif
Pendekatan kualitatif dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara mendalam.



Rujukan awal berupa data kuantitatif sebagai sumber data utama

Kualitatif; mengkonfirmasi, meluruskan, dan melengkapi hasil *review* surat kabar dan dokumen

Review Surat Kabar

- Surat kabar terkemuka di setiap provinsi periode Januari – Desember 2010
- Surat kabar telah dipilih sejak IDI 2007
- Ditentukan berdasarkan:
 - a. Oplah terbesar
 - b. Independensi
- IDI 2010 masih menggunakan surat kabar yang sama (Pos Kupang) dengan tahun sebelumnya untuk menjaga keterbandingan data

Review Dokumen Resmi

- Dokumen resmi pemerintah yang masih berlaku sampai tahun 2010 dikeluarkan pemerintah daerah:
 - a. Provinsi,
 - b. Kabupaten/kota,
 - c. SKPDcontoh: perda, pergub, perbup/perwali, surat kepala dinas, dll
- Catatan administrasi resmi, seperti jumlah anggota DPRD terpilah jenis kelamin dari sekretariat Dewan, Kepengurusan partai politik terpilah jenis kelamin, data kegiatan kaderisasi dari partai politik, dll.

Focus Group Discussion (FGD)

Tujuan FGD IDI:

1. Mengkonfirmasi fakta yang terkait dengan temuan *review* surat kabar dan dokumen.
2. Menambah informasi terkait dengan kasus-kasus yang dianggap besar/menarik.
3. Menelusuri kasus-kasus yang relevan dan belum tercatat dalam data *review* surat kabar dan dokumen.

Focus Group Discussion (FGD)

Peserta FGD:

1. Merupakan sumber data utama yang akan digali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang terkait indikator.
2. Mewakili profesi, kelompok, pengalaman, pengetahuan, jabatan, atau yang dianggap relevan lainnya.

Pelaksanaan FGD:

FGD dilaksanakan dua hari, dengan rincian:

- Hari I : Kebebasan Sipil
- Hari II : Hak-hak Politik dan Kinerja Institusi Demokrasi.

Hasil FGD:

Dapat melengkapi data hasil review surat kabar dan dokumen

Wawancara Mendalam (WM)

- WM digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* surat kabar dan dokumen serta FGD
- Dalam proses pengumpulan data, WM bersifat komplementer melengkapi ketiga metode lainnya
- Nara sumber WM adalah orang terpilih yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas terkait indikator IDI

TAHAPAN PENGHITUNGAN IDI

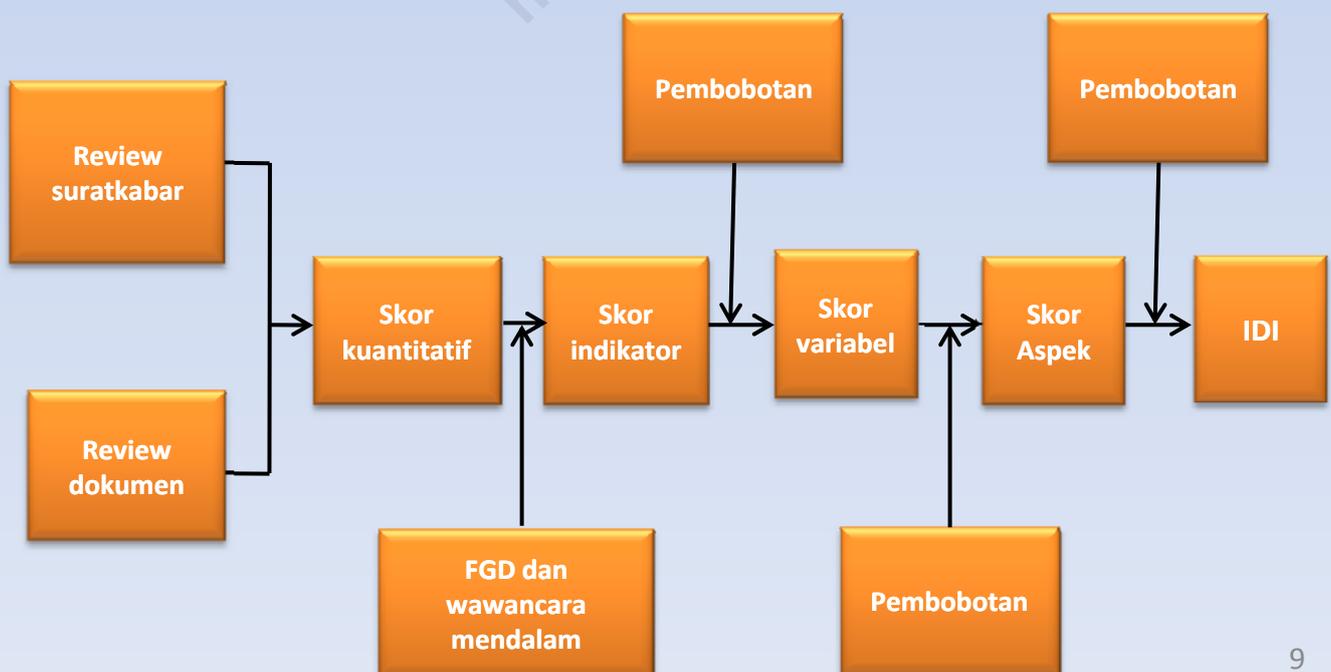


Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja demokrasi digunakan skala 0-100. Skala tersebut dibagi dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu:

- Baik, lebih besar dari 80
- Sedang antara 60 sampai dengan 80
- Kurang, lebih kecil dari 60

Tahapan Penghitungan IDI



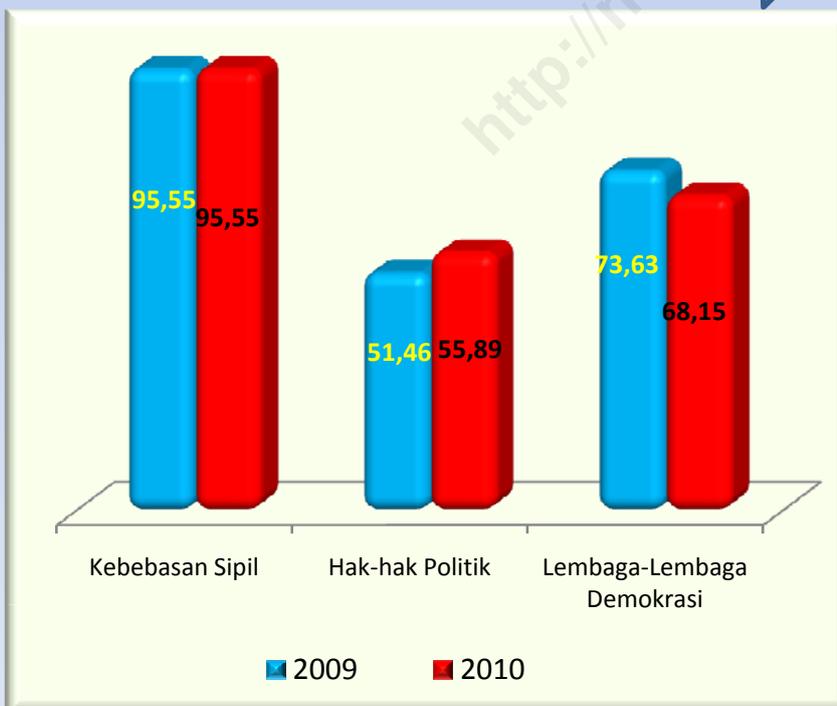
Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010



Angka IDI 2009 NTT sebesar 71.64 naik menjadi 72.05 pada IDI 2010 sehingga peringkat NTT yang berada di peringkat 9 dari 33 propinsi di Indonesia pada tahun 2009 naik menjadi peringkat 6 pada tahun 2010. Sementara angka IDI Indonesia mengalami penurunan dari 67.30 pada tahun 2009 menjadi 63.17 pada tahun 2010.

Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 menurut Aspek

Aspek hak-hak politik memberikan kontribusi indeks paling kecil dibanding aspek kebebasan sipil dan lembaga-lembaga demokrasi



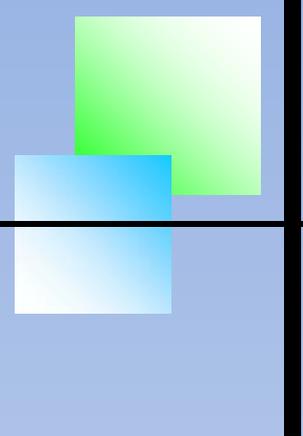
- Aspek kebebasan sipil pada tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan angka indeks yang sama yaitu 95.55
- Aspek hak-hak politik mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 51.46 pada tahun 2009 menjadi 55.89 pada tahun 2010
- Aspek lembaga-lembaga demokrasi menunjukkan penurunan dari 73.63 pada tahun 2009 menjadi 68.15 pada tahun 2010

Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Kebebasan Sipil menurut Variabel

Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menunjukkan penurunan yang paling signifikan dan kontribusi paling kecil pada nilai indeks aspek kebebasan sipil.



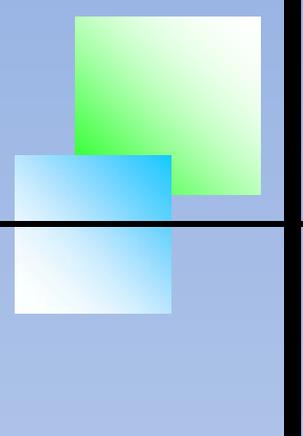
Dari gambar diatas, pada tahun 2010 variabel kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan berpendapat mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2009. Sebaliknya variabel kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi menunjukkan peningkatan.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan 2010, NTT Aspek Kebebasan Sipil menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Kebebasan Sipil	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel kebebasan berkumpul dan berserikat	91.25	56.25
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90.00	50.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100.00	100.00

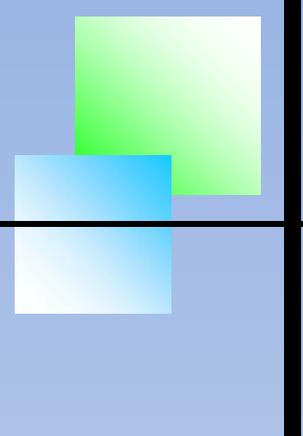
Pada tahun 2010 variabel kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding dengan tahun 2009. Faktor utama yang menyebabkan penurunan angka indeks variabel ini adalah turunnya indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dari 90.00 pada tahun 2009 menjadi 50.00 pada tahun 2010.



**Perbandingan
Hasil IDI 2009 dan 2010, NTT
Aspek Kebebasan Sipil menurut Indikator**

Variabel, Indikator Aspek Kebebasan Sipil	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel kebebasan berpendapat	100,00	91.65
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	50.00

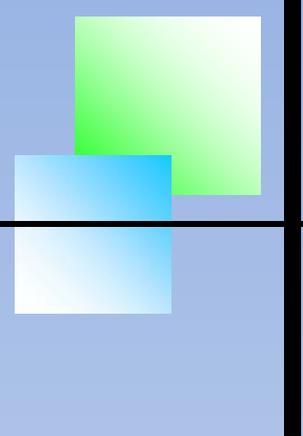
Pada tahun 2010 variabel kebebasan berpendapat sedikit mengalami penurunan dibanding 2009. Faktor yang menyebabkan penurunan angka indeks variabel ini adalah turunnya indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dimana pada tahun 2009 memberikan kontribusi indeks 100.00 menjadi 50.00 pada tahun 2010. Hal ini berarti terjadi peningkatan kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat pada tahun 2010 dibanding tahun 2009.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Kebebasan Sipil menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Kebebasan Sipil	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel kebebasan berkeyakinan	98,87	100.00
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100.00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	90,00	100.00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	100,00	100.00

Variabel kebebasan berkeyakinan memberikan kontribusi terbesar pada aspek kebebasan sipil. Kontribusi variabel ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai indeks pada tahun 2009 sebesar 98.87 naik menjadi 100.00 pada tahun 2010.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Kebebasan Sipil menurut Indikator

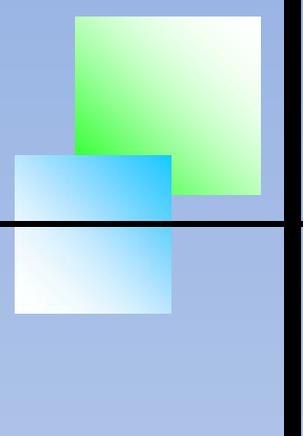
Variabel, Indikator Aspek Kebebasan Sipil	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel kebebasan dari diskriminasi	87,21	100.00
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	83,33	100.00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	77,50	100.00
Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100.00

Variabel kebebasan dari diskriminasi menyumbang nilai indeks sempurna pada tahun 2010. Angka indeks ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Hak-Hak Politik menurut Variabel



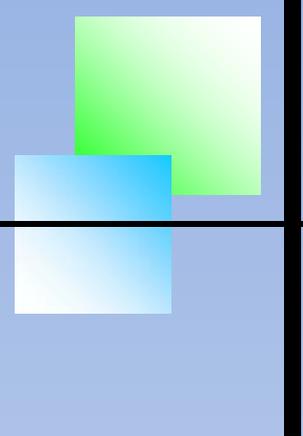
Aspek hak-hak politik menyumbang nilai indeks terkecil dibanding aspek lainnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kontribusi dua variabelnya yaitu hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Meskipun demikian untuk variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 52.65 pada tahun 2009 menjadi 61.53 pada tahun 2010.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Hak-Hak Politik menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Hak-Hak Politik	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel hak memilih dan dipilih	50.26	50.26
Kejadian dimana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	94.23	94.23
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	50.00	50.00
Kualitas daftar pemilih tetap	30.00	30.00
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)	81.40	81.40
Persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota	24.24	24.24

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan, kecuali indikator persentase perempuan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota

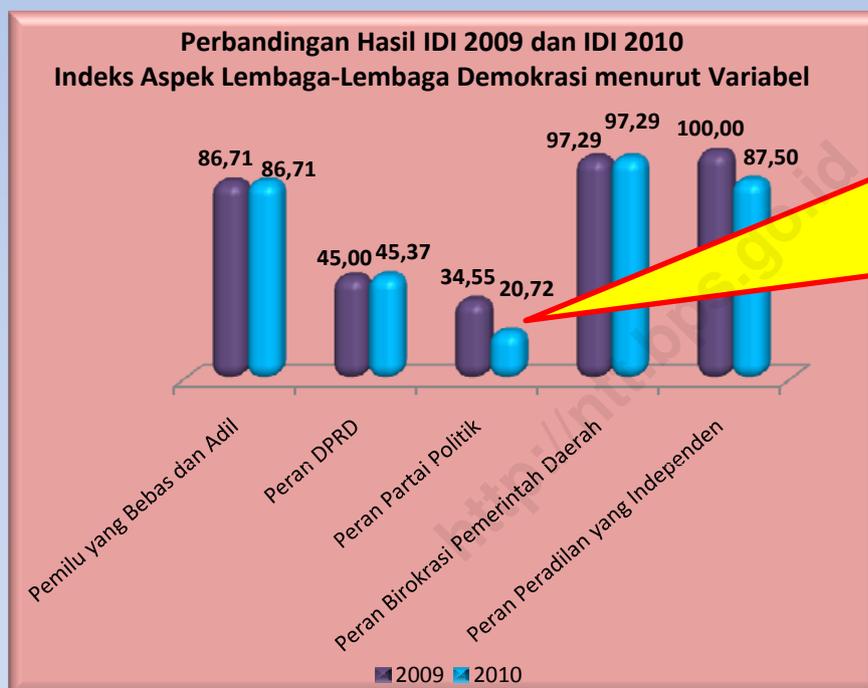


Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Hak-Hak Politik menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Hak-Hak Politik	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan	52.65	61.53
Persentase demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan terhadap total demonstrasi/mogok	86.96	47.83
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	18.35	75.23

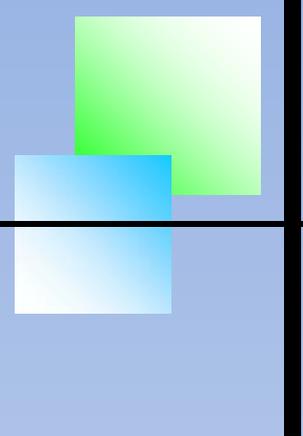
Variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 52.65 pada tahun 2009 menjadi 61.53 pada tahun 2010. Hal ini disebabkan oleh tingginya pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang menyebabkan indeks pada indikator ini meningkat. Sebaliknya jumlah demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan juga meningkat, akibatnya nilai indeks pada indikator tersebut turun

Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi menurut Variabel



Peran parpol memberikan kontribusi terkecil pada aspek lembaga-lembaga demokrasi

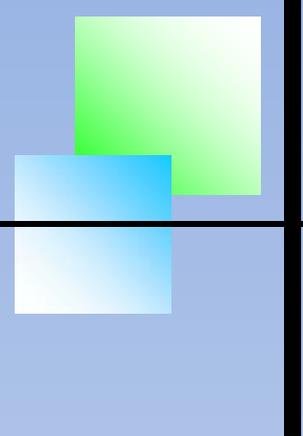
Aspek lembaga-lembaga demokrasi terdiri dari 5 variabel. Dua variabel merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan yaitu variabel pemilu yang bebas dan adil serta peran birokrasi pemerintah daerah. Sementara variabel peran DPRD menunjukkan sedikit peningkatan. Sebaliknya variabel peran partai politik dan peran peradilan yang independen mengalami penurunan yang cukup signifikan.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel Pemilu yang bebas dan adil	86.71	86.71
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100.00	100.00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	73.42	73.42

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan

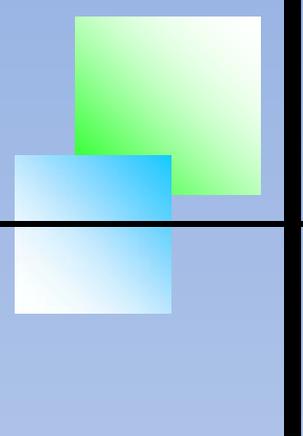


Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi menurut Indikator

Selama tahun 2009-2010 tidak ada perda yang disahkan DPRD Provinsi yang berasal dari hak inisiatif DPRD

Variabel, Indikator Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel peran DPRD	45.00	45.37
Besaran alokasi anggaran pendidikan	36.35	35.47
Besaran alokasi anggaran kesehatan	100.00	100.00
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	0.00	0.00
Rekomendasi DPRD kepada eksekutif	0.00	3.57

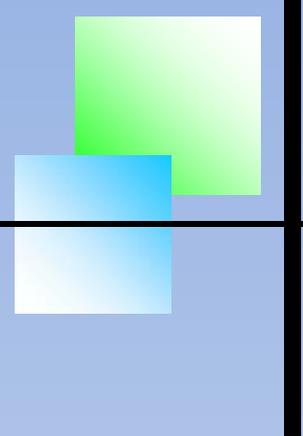
Variabel peran DPRD menunjukkan sedikit peningkatan. Hal ini disebabkan kontribusi dari indikator rekomendasi DPRD kepada eksekutif. Sementara besaran alokasi anggaran pendidikan mengalami sedikit penurunan angka indeks dari 36.35 pada tahun 2009 menjadi 35.47 pada tahun 2010.



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel peran parpol	34.55	20.72
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	28.57	14.29
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	88.35	78.67

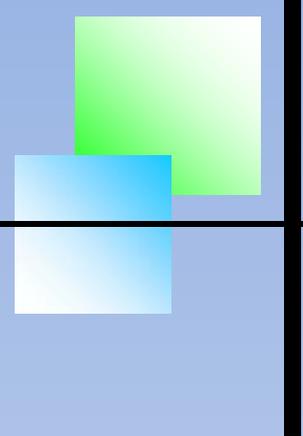
Variabel peran partai politik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Faktor utama penyebabnya adalah menurunnya indeks kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu yaitu dari 28.57 pada tahun 2009 menjadi 14.29 pada tahun 2010. Indeks ini menunjukkan bahwa kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik sangat rendahnya bahkan ada partai politik yang sama sekali tidak melakukan kaderisasi selama periode tersebut.



**Perbandingan
Hasil IDI 2009 dan IDI 2010
Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi
menurut Indikator**

Variabel, Indikator Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel peran birokrasi Pemda	97.29	97.29
Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon /parpol tertentu dalam pemilu legislatif	99.12	99.12
Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif	95.45	95.45

Variabel ini merujuk pada pemilu legislatif 2009 sehingga nilai indeks yang dihasilkan tidak mengalami perubahan



Perbandingan Hasil IDI 2009 dan IDI 2010 Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi menurut Indikator

Variabel, Indikator Aspek Lembaga-Lembaga Demokrasi	Indeks 2009	Indeks 2010
Variabel peran peradilan yang independen	100.00	87.50
Keputusan hakim yang kontroversial	100.00	75.00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100.00	100.00

Variabel peran peradilan yang independen mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 100.00 pada tahun 2009 menjadi 87.50 pada tahun 2010. Hal ini karena ditemukan keputusan hakim yang kontroversial di tahun 2010 sehingga mengurangi indeks yang cukup signifikan pada indikator tersebut.

LAMPIRAN

Tabel 1. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi , Tahun 2009

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	66,29	64,42	70,39	62,13
Sumut	60,20	84,16	41,26	60,14
Sumbar	60,29	63,06	53,57	67,48
Riau	75,85	93,14	65,40	70,68
Jambi	71,00	95,86	50,41	72,43
Sumsel	72,52	95,42	56,07	69,83
Bengkulu	64,76	94,26	54,03	44,70
Lampung	67,47	90,57	51,81	63,27
Babel	67,01	96,51	48,29	59,65
Kep. Riau	73,61	96,22	59,47	67,62
DKI Jakarta	73,91	91,65	52,20	86,09
Jawa Barat	71,07	85,84	68,48	56,61
Jawa Tengah	66,45	86,48	51,85	64,43
DIY	67,55	92,15	52,52	60,48
Jawa Timur	62,49	83,30	50,96	54,64
Banten	67,98	95,46	49,47	62,83
Bali	70,35	93,97	49,82	73,24
NTB	58,12	68,05	47,50	62,48
NTT	71,64	95,55	51,46	73,63
Kalbar	72,38	98,29	53,46	69,85
Kalteng	77,63	98,45	60,50	78,69
Kalsel	66,63	68,24	62,63	70,95
Kaltim	72,31	98,22	54,78	67,57
Sulut	70,94	92,23	58,50	63,91
Sulteng	66,02	98,51	45,90	57,14
Sulsel	61,48	82,94	42,36	64,88
Sultra	64,29	94,66	43,97	58,37
Gorontalo	73,50	96,05	56,39	73,32
Sulbar	67,99	93,82	53,09	59,15
Maluku	69,07	92,77	52,05	66,30
Maluku Barat	67,21	93,61	46,30	67,23
Papua Barat	63,06	93,14	37,09	66,48
Papua	63,80	92,83	43,84	58,97
INDONESIA	67,30	86,97	54,60	62,72

LAMPIRAN

Tabel 2. Aspek Indeks Demokrasi di 33 Provinsi ,Tahun 2010

Provinsi	Indeks Keseluruhan	Aspek Demokrasi		
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga-lembaga Demokrasi
NAD	65.36	69.98	62.63	63.87
Sumut	63.45	76.64	57.42	56.45
Sumbar	63.04	58.34	63.90	67.59
Riau	71.45	91.02	47.19	85.39
Jambi	65.88	85.15	48.14	69.81
Sumsel	73.65	100.00	55.17	69.85
Bengkulu	70.78	94.40	64.35	51.29
Lampung	67.80	94.39	53.90	56.44
Babel	65.94	85.95	48.44	68.57
Kep. Riau	62.89	87.04	39.80	69.20
DKI Jakarta	77.44	92.46	56.19	92.30
Jawa Barat	59.41	74.41	46.74	60.67
Jawa Tengah	63.42	84.83	46.29	63.70
DIY	74.33	91.24	55.96	82.25
Jawa Timur	55.12	78.48	42.06	46.47
Banten	60.60	83.17	38.70	66.99
Bali	72.44	94.10	51.52	78.43
NTB	58.13	67.22	46.48	65.19
NTT	72.05	95.55	55.89	68.15
Kalbar	69.32	99.17	45.19	70.11
Kalteng	71.10	94.51	56.05	65.57
Kalsel	70.94	67.74	72.66	72.25
Kaltim	73.04	97.79	53.89	72.34
Sulut	65.94	92.98	44.90	65.34
Sulteng	66.63	92.19	51.82	58.01
Sulsel	56.67	78.19	32.40	68.17
Sultra	54.79	83.71	30.46	57.06
Gorontalo	64.97	82.55	51.72	63.90
Sulbar	67.57	94.48	47.22	66.06
Maluku	69.51	96.22	48.12	69.89
Maluku Barat	59.92	92.59	30.82	65.06
Papua Barat	67.75	99.84	44.24	64.73
Papua	60.26	90.72	31.76	67.22
INDONESIA	63.17	82.53	47.87	63.11

<http://ntt.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Jl. R. Suprpto No. 5 Kupang 85111

Telp.: (0380) 826289, 821755, Fax: (0380) 833124

E-mail: bps5300@bps.go.id

Web site: <http://ntt.bps.go.id>